

LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING TAHUN KE I



JUDUL

MODEL PENGEMBANGAN KEHUTANAN SOSIAL (*Social Forestry*)
BERBASIS EKOSISTEM DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN
PRODUKSI GUNA MENJAMIN KELESTARIAN HUTAN DAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI KAB. MUKO MUKO, PROPINSI BENGKULU)

Disusun Oleh :

SISWAHYONO, S.Hut, MP
WIRYONO.Ph.D
Ir. EDI SUHARTO, MP

DIBIAYAI OLEH DIPA UNIB NO. 024.0/023-04.2/VIII/2009
BERDASARKAN SURAT KONTRAK
NOMOR 2803/H30.10.06.01/HK/2009 TANGGAL 01 APRIL 2009

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BENGKULU
NOVEMBER 2009**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUN PERTAMA

1. Judul Usul Penelitian : Model Pengembangan Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) Berbasis Ekosistem Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Guna Menjamin Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kab. Muko Muko, Propinsi Bengkulu)

2. Ketua Peneliti

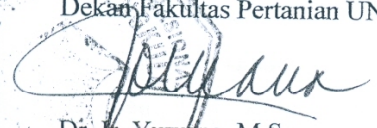
- a) Nama lengkap dengan gelar : Siswahyono, S.Hut, MP
- b) Bidang Keahlian : Manajemen Hutan
- c) Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d) Unit Kerja : Jur. Kehutanan Faperta Universitas Bengkulu
- e) Alamat surat : Jl. Raya Kandang Limun Bnegkulu
- f) Telepon/fax : (0736) 21170 ext 209 / (0736) 22105
- g) Email : siswahyono@unib.ac.id
- h) Anggota Tim Peneliti : 2 (dua) orang

No.	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Jur./Fakultas	Perguruan Tinggi
1.	Wiryono, Ph.D	Ekologi	Kehutanan/Pertanian	Universitas Bengkulu
2.	Ir. Edi Suharto, MP	Tanah	Kehutanan/Pertanian	Universitas Bengkulu

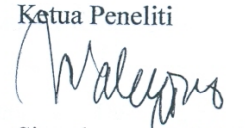
3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian :
- a. Jangka waktu penelitian : 2 tahun
 - b. Biaya total yang diusulkan : 90.600.000
 - c. Biaya yang disetujui tahun Pertama : 42.500.000

Bengkulu, Nopember 2009


Mengetahui,
Dekan Fakultas Pertanian UNIB


Dr. R. Yuwana, M.Sc
NIP. 19591210 198603 1 003

Ketua Peneliti


Siswahyono, S.Hut, MP
NIP.19720121 199703 1 001

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Bengkulu


Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum
NIP. 19581112 198603 1 002

RINGKASAN

MODEL PENGEMBANGAN KEHUTANAN SOSIAL (*SOCIAL FORESTRY*) BERBASIS EKOSISTEM DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI GUNA MENJAMIN KELESTARIAN HUTAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KABUPATEN MUKO MUKO, PROPINSI BENGKULU) (Siswahyono, Wiryono, Edi Suharto, 47 hal)

Kerusakan hutan yang hampir terjadi di seluruh wilayah nusantara ini dan tingginya angka kemiskinan masyarakat sekitar hutan, merupakan bukti kegagalan pengelolaan hutan secara konvensional (*timber forest management*). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam pengelolaan hutan yang mampu mengakomodir kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat akibat pertambahan jumlah penduduk dalam mewujudkan kelestarian fungsi hutan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Memperoleh informasi kondisi biogeofisik kawasan hutan produksi dan desa di sekitarnya, serta kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan dasar perumusan pemanfaatan hutan dalam pengelolaan kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Muko Muko yang menjamin fungsi ekonomi, ekologi dan fungsi sosial
2. Mengkuantifikasi berbagai variabel berpengaruh yang membentuk sistem pembangunan wilayah baik desa sekitar hutan kaitannya dengan pengelolaan hutan produksi di Kabupaten Muko-Muko.

Penelitian ini dilaksanakan di dalam kawasan Hutan Produksi (HP) Air Dikit dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Manjuntio serta desa di sekitarnya yaitu Desa Bukit Makmur Kecamatan Penarik, Desa Lalang Luas dan Desa Talang petai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Muko Muko. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk memperoleh data kondisi sosial ekonomi masyarakat desa dan survey *groundcheck* untuk memperoleh data kondisi biofisik kawasan hutannya. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

Dalam kawasan Hutan Produksi Air Dikit dan Hutan Produksi Terbatas Air Manjuntio yang berbatasan langsung dengan Desa Bukit Makmur, Desa

Lalang Luas dan Desa Talang Petai telah terjadi pencurian kayu dan perambahan hutan. Ketiadaan pengelola hutan di tingkat tapak dan batas kawasan hutan dengan lahan desa-desa sekitar yang tidak jelas menjadikan masyarakat mudah untuk melakukan kegiatan perambahan dan pencurian kayu. Ini menggambarkan telah terjadi interaksi yang bersifat destruktif dalam pembangunan wilayah desa terhadap hutan yang belum diakomodir dalam pengelolaan hutan.

Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, dengan menempatkan strategi kehutanan sosial sebagai dasar untuk merumuskan permasalahan dan tujuan pengelolaan hutan, maka ada 3 subsistem yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan produksi di wilayah Kabupaten Muko Muko khususnya di HP Air Dikit dan HPT Air Manjuntio, yaitu subsistem pertanian, subsistem kehutanan dan subsistem sosial-ekonomi masyarakat.

Beberapa aspek yang menyebabkan kegagalan dalam pengelolaan hutan produksi antara lain : (1) umumnya kebutuhan kayu pertukangan masyarakat sekitar hutan tidak bisa dipenuhi dari lahan pertanian, (2) pencurian kayu merupakan alternatif pekerjaan ketika menganggur, (3) perambahan kawasan hutan oleh masyarakat sekitarnya akibat perluasan lahan kelapa sawit dan (4). Terbatasnya sumber dana dan sumber daya manusia dalam “pengelolaan hutan”.

Kelapa sawit merupakan jenis tanaman utama yang dibudidayakan oleh masyarakat sekitar hutan pada lahan miliknya dan lahan perambahan dalam kawasan hutan. Di kawasan hutan produksi Air Dikit, luas perambahan masyarakat rata-rata mencapai 3,72 hektar/KK. Perambahan terjadi karena rendahnya kebutuhan tenaga kerja dalam budidaya tanaman kelapa sawit (sekitar 87 HOK/Ha/ tahun), meskipun lahan miliknya di luar kawasan hutan rata-rata mencapai 3,68 hektar/KK.

Bentuk pengelolaan kehutanan sosial perlu disusun secara partisipatif, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan. Perencanaan partisipatif akan menjadikan masyarakat merasa memiliki, menjaga sekaligus memperoleh manfaat ekonomi akan hutan yang berada di sekitarnya.

SUMMARY

MODEL OF SOCIAL FORESTRY DEVELOPMENT BASED ON ECOSYSTEM IN FOREST PRODUCTION AREA MANAGEMENT IN ORDER TO FOREST SUSTAINABILITY AND TO INCREASE PEOPLE WELFARE (CASE STUDY IN MUKO MUKO REGENCY, BENGKULU PROVINCE) (Siswahyono, Wiryono, Edi Suharto, p.47)

Forest degradation happened almost in around Indonesia and highly number of poverty community in surrounding forest give an indication failure of timber forest management. Therefore, need new approach in production forest management which could accommodate to meet community need caused population growth in order to forest sustainability.

The objectives of this research were to get the information of biogeophysics production forest area and villages in surround forest, and social-economic-cultural condition of people to formulate the model forest utilize in production forest management in Muko Muko Regency, and to quantifying variables that influencing in region development sistem linkages with forest management.

The research is conducted in production forest Air Dikit and Air Manjuntio area and it's orrounding villages : Bukit Makmur, Lalang Luas and Talang Petai. Basic method used in this research is survey method with PRA technique to obtain social-economic cultural data of people, and survey groundchek technique to obtain biogeophysics data of production forest Air Dikit and Air Manjuntio. The data was analysed using descriptive analysis.

Encroachment and illegal cutting was happened in Air Dikit and Air Manjuntio Production forest which boundary with villages : Desa Bukit Makmur, Lalang Luas ang Talang Petai. Intense destructive interaction due to aspects of región development which have not been accomodate in the forest management. Based on strategy of social forestry as a reference to formuláte the goal of forest management, result showed that there are three subsistem : forestry, agricultura and social economic, influencing in the forest management. Several aspect which causing the failure of the production forest management were (1). the local community need for furniture Wood can not be fulfill from agricultural land, (2).

illegal cutting as a part of job opportunity in the cover unemployment, (3). encroachment by local community because extensification of kelapa sawit plantation, and (4). Low in the quantity and quality of forest management because limiting staff, equipment and infrastructure.

Kelapa sawit is main plant that people planted in land property and area of encroachment. In Air Dikit forest area, their field wide of encroachment is about 3,72 hectares of each head family. Encroachment happened caused low quantity of employment (87 HOK/Ha/year) in kelapa sawit plantation, although land property average 3,68 hectares each family head.

(Forestry Departement, Faculty of Agricultural, Bengkulu University)

BAB I. PENDAHULUAN

Sumber daya alam mempunyai arti dan peranan penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan manusia akan pangan, papan, sandang dan kebutuhan dasar lainnya. Sumber daya alam baik hutan, tanah, mineral dan air, dapat mengalami kerusakan apabila pemanfaatannya mengabaikan kaidah-kaidah kelestariannya.

Peningkatan jumlah penduduk mempunyai hubungan erat terhadap pemanfaatan sumber daya hutan yang dapat menurunkan fungsi hutan sendiri. Keadaan umum desa-desa sekitar kawasan hutan yang dicirikan oleh rendahnya pendapatan perkapita, terbatasnya kesempatan kerja di luar sektor pertanian, terbatasnya pemilikan lahan dan rendahnya produktivitas usaha tani, merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat memanfaatkan potensi sumberdaya hutan yang ada.

Perubahan fisik struktur penutupan lahan vegetasi hutan menjadi lahan pertanian semusim, perkebunan dan pola monokultur lainnya, telah memberikan kontribusi terhadap terganggunya keseimbangan ekosistem. Terjadinya pendangkalan sungai dan banjir merupakan gambaran bagaimana tekanan masyarakat yang bersifat destruktif terhadap pemanfaatan sumber daya hutan telah dan sedang terjadi.

Di wilayah Kabupaten Muko-Muko, kegiatan perambahan hutan dan pencurian kayu merupakan salah satu bentuk kegiatan destruktif terhadap pemanfaatan sumber daya hutan. Kegiatan perambahan hutan dilakukan dengan cara menebang pohon, membakar dan dilanjutkan menanam komoditas tanaman semusim, kopi dan jenis lainnya. Kegiatan ini akan menyebabkan siklus unsur hara untuk sementara waktu berhenti, mengingat kesuburan tanahnya sangat bergantung pada bahan organik yang dihasilkan vegetasi di atasnya. Heterogenitas jenis dan struktur vertikal vegetasi penutup lahan tanaman budidaya yang lebih rendah dibandingkan vegetasi hutan alam, menyebabkan kesuburan lahan tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu lama dan usaha tani kurang

menguntungkan secara ekonomis. Lahan yang sudah kurus akan ditinggalkan dan akan membuka lahan kebun baru.

Dalam pengelolaannya, wilayah hutan produksi di Kabupaten Muko-Muko pernah dilakukan pengusahaan hutan oleh beberapa pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) antara lain PT. Bina Samaktha dan PT. Maju Jaya Raya Timber. Namun sejak berakhirnya ijin konsesi HPH kedua perusahaan tersebut pada tahun 1990-an dan tidak diperpanjang lagi, kawasan hutan produksi tersebut menjadi tidak terkelola hingga sekarang. Dengan demikian, selama 10 tahun terakhir, dalam kawasan hutan produksi tersebut tidak dilakukan aktivitas pengelolaan secara menyeluruh dan tidak memberikan nyata dalam pembangunan wilayah.

Dengan tidak dikelolanya kawasan hutan produksi selama satu dasawarsa tersebut dan tersedianya jaringan jalan eks kedua perusahaan HPH tersebut, disamping keterbatasan sumber daya manusia pengamanan hutan dan sumber dananya, diduga telah membuka peluang terjadinya perambahan dan pencurian kayu.

Pada saat ini, terjadi pergeseran dalam paradigma pembangunan kehutanan Indonesia. Jika pada dasawarsa yang lewat, paradigma pembangunan kehutanan adalah pengelolaan yang berorientasi pada kayu (*timber forest management*), maka pada saat ini pembangunan kehutanan mengarah kepada *forest resource management*. Paradigma ini mengarahkan pembangunan kehutanan dengan memandang hutan sebagai sebuah kesatuan ekologis (ekosistem). Semangat ini terlihat jelas dalam Undang-undang no. 41 Tahun 1999.

Kerusakan hutan yang hampir terjadi di seluruh wilayah nusantara ini dan tingginya angka kemiskinan masyarakat sekitar hutan, merupakan bukti kegagalan pengelolaan hutan secara konvensional (*timber forest management*). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam pengelolaan hutan yang mampu mengakomodir kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat akibat pertambahan jumlah penduduk dalam mewujudkan kelestarian fungsi hutan.

Kehutanan sosial (*social forestry*) dipandang sebagai suatu konsep paradigma baru dalam pengelolaan hutan. Sebagai suatu konsep, kehutanan sosial memandang pengelolaan hutan adalah pengelolaan ekosistem. Sebagai suatu

ekosistem, hutan merupakan satu kesatuan yang di dalamnya terjadi interaksi antara makhluk hidup (termasuk manusia) dengan lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Jadi setiap bentuk pengelolaan kawasan hutan melekat tujuan yang meliputi produksi (ekonomi), perlindungan (ekologi) dan sosial. Dalam aplikasinya, ragam pengelolaan didasarkan pada intensitas masalah sosial ekonomi masyarakat dan kondisi biofisik kawasan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1995. Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pembangunan Hutan Kemasyarakatan. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta
- Anonim, 1998. Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6677/Kpts-II/1998 tentang Pembangunan Hutan Kemasyarakatan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia. Jakarta
- Anonim, 1999. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta
- Anonim, 2001. Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pembangunan Hutan Kemasyarakatan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia. Jakarta.
- Anonim. 2004. Laporan Penyusunan Rancang Bangun Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi Propinsi Bengkulu. Balai Informasi dan Perpetaan Hutan (BIPHUT) Bengkulu.
- Cernea, M. 1992. A Sociological Framework : Policy, Environment, and the Social Actors for Tree Palnting. In Narendra P. Sharma : Managing the World's Forest. Kendall/Hunt Publishing Company. Iowa. USA.
- Dove, Michael R. 1988. Sistem Perladangan di Indonesia suatu Studi Kasus dari Kalimantan Barat. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Masykuri dkk. 1996. Peta Sejarah Propinsi Bengkulu. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional,. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta.
- Sabarnurdin, S. Hairiah, K. dan Sardjono, M.A. 2003. Pengantar Agroforestri. World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor.
- Sardjono, M.A. 2004. Mosaik Sosiologis Kehutanan : Masyarakat Lokal, Politik dan kelestarian Sumber Daya. Debut Press. Yogyakarta.

- Senoaji, G. Siswahyono dan Erniwati. 2001. Studi Daya Dukung Lingkungan Desa-
desa Sekitar Hutan Lindung Ditinjau dari Aspek Ekologi, Ekonomi dan
Kelestarian Hutan. Laporan penelitian DIKS Universitas Bengkulu.
- Simon, H. 1994. Merencanakan Pembangunan Hutan Untuk Strategi Kehutanan
Sosial. Seri Kajian MR. Aditya Media, Yogyakarta.
- Simon, H. 2006. Membangun Kembali Hutan Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Siswahyono. 2001. Studi Potensi Hasil Hutan Non Kayu dan Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Pemanfaatannya di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun.
Laporan Penelitian Dosen Muda Dirjen Dikti. Jakarta
- Siswahyono. 2006. Studi Perencanaan Pengelolaan Hutan Lindung Berbasis
Masyarakat. Thesis Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
(tidak diterbitkan)
- Soemarwoto, O. 1992. Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global. Gramedia
Pustaka Utama. Jakarta.